



SOSIALISASI REGULASI PEMANFAATAN JENIS IKAN DILINDUNGI DAN/ATAU APPENDIKS CITES



DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- A. DASAR HUKUM
- B. JENIS IKAN DILINDUNGI /APPENDIKS CITES
- C. LAYANAN PERIZINAN
- D. PERMEN KP 61/2018
- E. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
- F. KEBIJAKAN TRANSISI
- G. PROSEDUR PENERBITAN SIPJI

DASAR HUKUM

KONVENSI CITES

Ditandatangani : 3 April 1973, Berlaku Efektif: 1 Juli 1975

Untuk melaksanakan ketentuan konvensi setiap Negara dapat menetapkan **satu atau lebih *Management Authority Competent (Otoritas Pengelola)*** dan **satu atau Lebih *Scientific Authority (Otoritas Keilmuan)***

RATIFIKASI OLEH INDONESIA

Kepres No. 43 Tahun 1978

UU No. 5 tahun 1990

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

TUMBUHAN

SATWA

SATWA LIAR

TERNAK

IKAN

PP No. 8 tahun 1999

Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar

Pasal 65

Departemen yang bertanggung jawab di bidang Kehutanan ditetapkan sebagai Otoritas Pengelola (*Management Authority*) Konservasi **Tumbuhan dan Satwa Liar**

Kepmenhut No. 447/Kpts-II/2003

Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran **Tumbuhan dan Satwa Liar**

UU No. 31 tahun 2004 jo UU No. 45 tahun 2009

Perikanan

IKAN

PP No. 60 tahun 2007

Konservasi Sumber Daya Ikan

Pasal 53

Departemen/Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perikanan ditetapkan sebagai Otoritas Pengelola (*Management Authority*) Konservasi **Sumber Daya Ikan**

Permen KP No. 61 tahun 2018 jo Permen KP No. 44 tahun 2019

Pemanfaatan Jenis Ikan yang Diindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES

JENIS IKAN DILINDUNGI / APPENDIKS CITES

DAFTAR JENIS IKAN BERSIRIP Dilindungi dan/atau Appendiks CITES

No	Nama Ilmiah	Nama Umum	Status CITES	Status Nasional	Keterangan
1	<i>Scleropages formosus</i>	Arwana Super Red	Appendiks I	Dilindungi	Permen LHK P.106/2018
2	<i>Scleropages formosus</i>	Arwana Golden	Appendiks I	Dilindungi	Permen LHK P.106/2018
3	<i>Scleropages formosus</i>	Arwana Banjar	Appendiks I	Dilindungi	Permen LHK P.106/2018
4	<i>Scleropages formosus</i>	Arwana Hijau	Appendiks I	Dilindungi	Permen LHK P.106/2018
5	<i>Scleropages jardini</i>	Arwana Irian / Jardini	-	Dilindungi	Permen LHK P.106/2018
6	<i>Rhcodon typus</i>	Hiu Paus	Appendiks II	Dilindungi Penuh	Kepmen KP 18/2013
7	<i>Carcharodon carcharias</i>	Hiu Putih	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
8	<i>Sphyrna spp.</i>	Hiu Martil	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
9	<i>Carcharhinus longimanus</i>	Hiu Kobo	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
10	<i>Lamna nasus</i>	Hiu Anjing	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
11	<i>Alopias spp.</i>	Hiu Tikus	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
12	<i>Carcharhinus falciformis</i>	Hiu Lanjaman	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
13	<i>Isurus spp.</i>	Hiu Mako	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
14	<i>Pristis spp.</i>	Pari Gergaji	Appendiks I	Dilindungi	Permen LHK P.106/2018

DAFTAR JENIS IKAN BERSIRIP Dilindungi dan/atau Appendiks CITES

No	Nama Ilmiah	Nama Umum	Status CITES	Status Nasional	Keterangan
15	<i>Manta spp.</i>	Pari Manta	Appendiks II	Dilindungi Penuh	Kepmen KP 4/2014
16	<i>Mobula spp.</i>	Pari Mobula	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
17	<i>Rhynchobatus spp.</i>	Pari Liongbun	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
18	<i>Rhynchobatus australiae</i>	Pari Kikir	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
19	<i>Rhina ancylostoma</i>	Pari Kupu-Kupu	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
20	<i>Himantura oxyrhynga</i>	Pari Sungai Tutul	-	Dilindungi	Permen LHK P.106/2018
21	<i>Himantura polylepis</i>	Pari Sungai Raksasa	-	Dilindungi	Permen LHK P.106/2018
22	<i>Himantura signifera</i>	Pari Sungai Pinggir	-	Dilindungi	Permen LHK P.106/2018
23	<i>Urolophus kaianus</i>	Pari Kei	-	Dilindungi	Permen LHK P.106/2018
24	<i>Chitala borneensis</i>	Belida Borneo	-	Dilindungi	Permen LHK P.106/2018
25	<i>Chitala hypselonotus</i>	Belida Sumatera	-	Dilindungi	Permen LHK P.106/2018
26	<i>Chitala lopis</i>	Belida Lopis	-	Dilindungi	Permen LHK P.106/2018
27	<i>Notopterus notopterus</i>	Belida Jawa	-	Dilindungi	Permen LHK P.106/2018
28	<i>Homaloptera gymnogaster</i>	Selusur Maninjau	-	Dilindungi	Permen LHK P.106/2018

DAFTAR JENIS IKAN BERSIRIP Dilindungi dan/atau Appendiks CITES

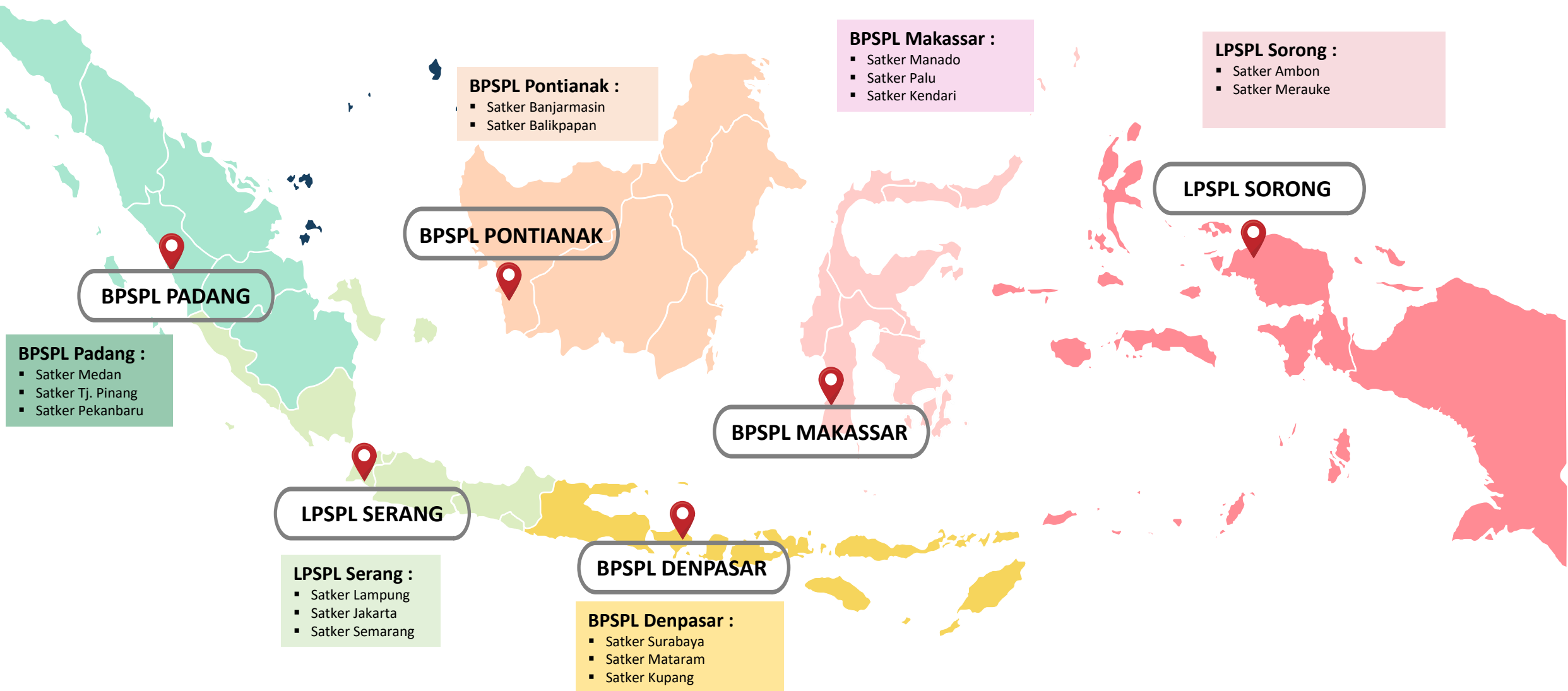
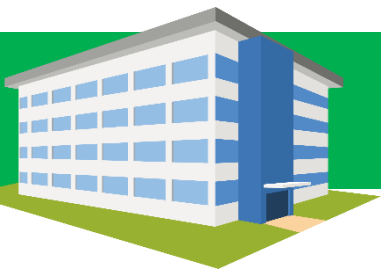
No	Nama Ilmiah	Nama Umum	Status CITES	Status Nasional	Keterangan
29	<i>Cheilinus undulatus</i>	Ikan Napoleon	Appendiks II	Dilindungi Terbatas	Kepmen KP 37/2013
30	<i>Hippocampus</i> spp.	Kuda Laut	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
31	<i>Holacanthus clarionensis</i>	Ikan Klarion Angel	Appendiks II	Tidak Dilindungi	
32	<i>Hypancistrus zebra</i>	Ikan Sapu Zebra	Appendiks III (Brazil)	Tidak Dilindungi	
33	<i>Balantiocheilos melanopterus</i>	Balashark	-	Dilindungi	Permen LHK P.106/2018
34	<i>Barbodes microps</i>	Wader Goa	-	Dilindungi	Permen LHK P.106/2018
35	<i>Neolissochilus thienemanni</i>	Ikan Batak	-	Dilindungi	Permen LHK P.106/2018
36	<i>Schismatorhynchus heterorhynchus</i>	Ikan Pasa	-	Dilindungi	Permen LHK P.106/2018
37	<i>Latimeria chalumnae</i>	Ikan Raja Laut	-	Dilindungi	Permen LHK P.106/2018
38	<i>Pterapogon kauderni</i>	Ikan Capungan Banggai / Banggai Cardinal Fish (BCF)	-	Dilindungi Terbatas	Kepmen KP 49/2018

LAYANAN PERIZINAN

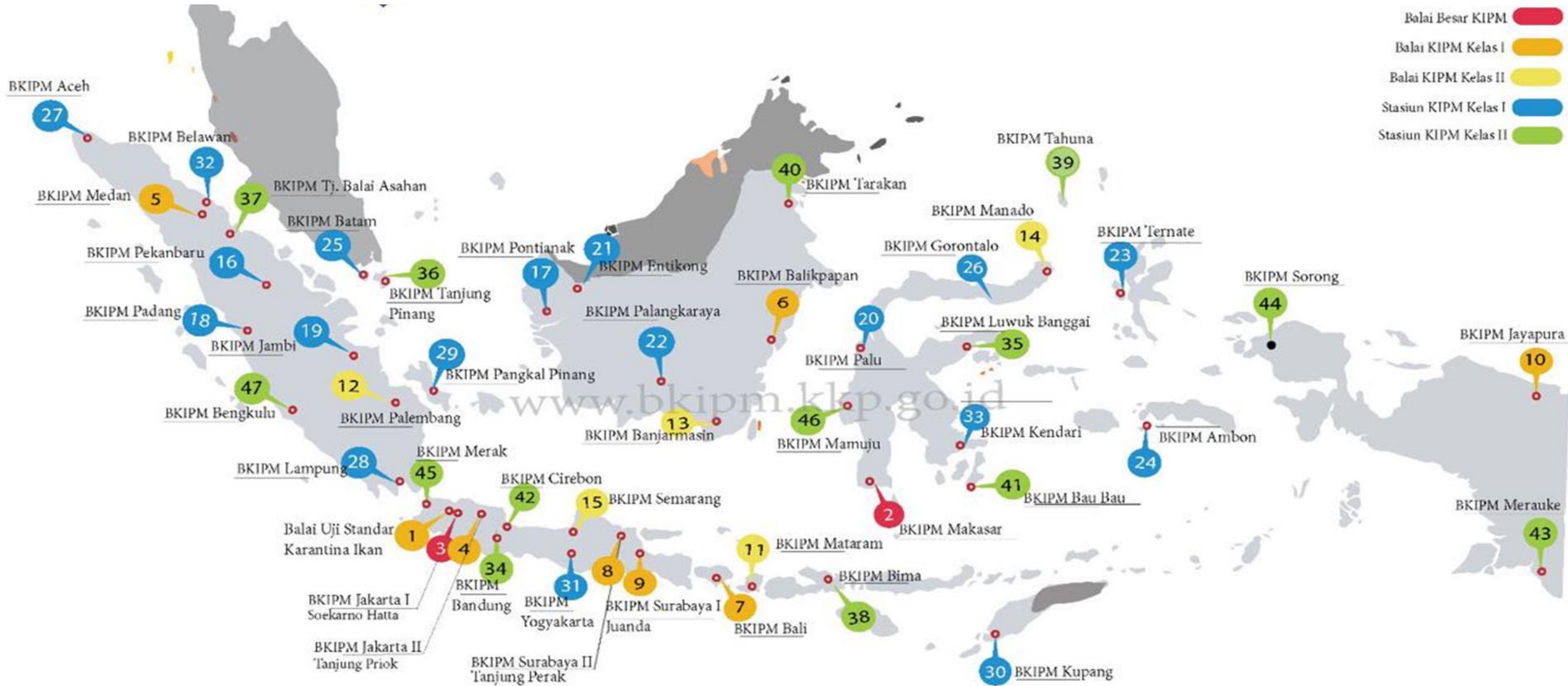
KEWENANGAN PERIZINAN

No.	JENIS PERIZINAN	PENERBIT IZIN	PENANDA TANGAN
1	SIPJI Penelitian dan Pengembangan	Pusat	Kepala BKPM
2	SIPJI Pengembangbiakan	Pusat	Kepala BKPM
3	SIPJI Perdagangan Dalam Negeri / Luar Negeri	Pusat	Kepala BKPM
4	SIPJI Aquaria	Pusat	Kepala BKPM
5	SIPJI Pertukaran Dalam Negeri / Luar Negeri	Pusat	Kepala BKPM
6	SIPJI untuk Pemeliharaan Untuk Kesenangan	Pusat	Kepala BKPM
7	Kuota Pengambilan (Nasional)	Pusat	Dirjen PRL
8	Kuota Ekspor	Pusat	Dirjen PRL
9	Izin Pengambilan (Kuota per Pelaku Usaha)	UPT	Kepala UPT PSPL
10	SAJI DN	UPT	Kepala UPT PSPL
11	SAJI LN	Pusat	Pejabat Penanda Tangan CITES <i>Exit Permit</i>
12	Rekomendasi	UPT	Kepala UPT PSPL

SEBARAN WILAYAH KERJA UPT DJTJEN PRL



KONTROL LALU LINTAS / PENGANGKUTAN & PENERBITAN SERTIFIKAT HC



PENGAWASAN PEMANFAATAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PSDKP



PERMEN KP 61/PERMEN-KP/2018

RUANG LINGKUP

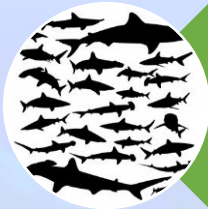
JENIS IKAN



Dilindungi



Appendiks CITES



Look Alike Species

Dokumen Perizinan

SIPJI

(Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan)

SAJI

(Surat Angkut Jenis Ikan)

SERTIFIKAT

REKOMENDASI

KETENTUAN PEMANFAATAN JENIS IKAN

DILINDUNGI

PENUH

Perlindungan Jenis Ikan yang dilakukan terhadap seluruh siklus hidup di habitat asli dan habitat buatan dan/atau pada seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur dan produk turunannya

Arwana Merah (Scleropages formosus), Pari Gergaji (Pristis sp.), Hiu Paus (Rhincodon typus), Pari Manta (Manta spp.)

TERBATAS

Perlindungan terhadap Jenis Ikan yang dilakukan berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu

Ikan Napoleon (Cheilinus undulatus), Ikan Capungan Banggai (Pterapogon kauderni), Ikan Terubuk (Tenualosa macrura)

APPENDIKS

I

Termasuk jenis ikan yang telah **terancam punah (endangered)** sehingga perdagangan internasional spesimen yang berasal dari habitat alam **harus dikontrol dengan ketat** dan hanya diperkenankan untuk kepentingan tertentu dengan izin khusus

Arwana Merah (Scleropages formosus), Pari Gergaji (Pristis sp.)

II

Termasuk Jenis Ikan yang saat ini **belum terancam punah**, namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan

Ikan Napoleon (Cheilinus undulates), Hiu Kobo (Carcharhinus longimanus), Hiu Martil (Sphyrna spp.), Hiu Tikus (Alopias spp.), Hiu Lanjaman (Carcharhinus falciformis), Kuda Laut (Hippocampus spp.), Pari Liongbun (Rhynchobatus spp.), Teripang Hitam (Holothuria nobilis), Teripang Susu (Holothuria witmae), dll

III

Termasuk Jenis Ikan yang oleh suatu negara tertentu yang **pemanfaatannya dikendalikan** dengan ketat dan memerlukan bantuan pengendalian internasional

#

Jenis ikan yang **mempunyai kemiripan (look alike species)** dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES

Hiu/pari lainnya (other Chondrichthyes), Teripang lainnya (Holothuroidea), Karang Lunak / Soft Coral (Alcyonacea), Anemon (Actiniaria), Karang Hias buatan (artificial live rock)

Look Alike



PRINSIP DASAR

Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES

1. **Legalitas (*Legality*)**

setiap pemanfaat jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES wajib dilengkapi dengan izin

Contoh: SIPJI, Izin Pengambilan

2. **Ketelusuran (*Traceability*)**

setiap jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES yang dimanfaatkan wajib dilengkapi dengan dokumen keterangan asal usul bukti kepemilikan,

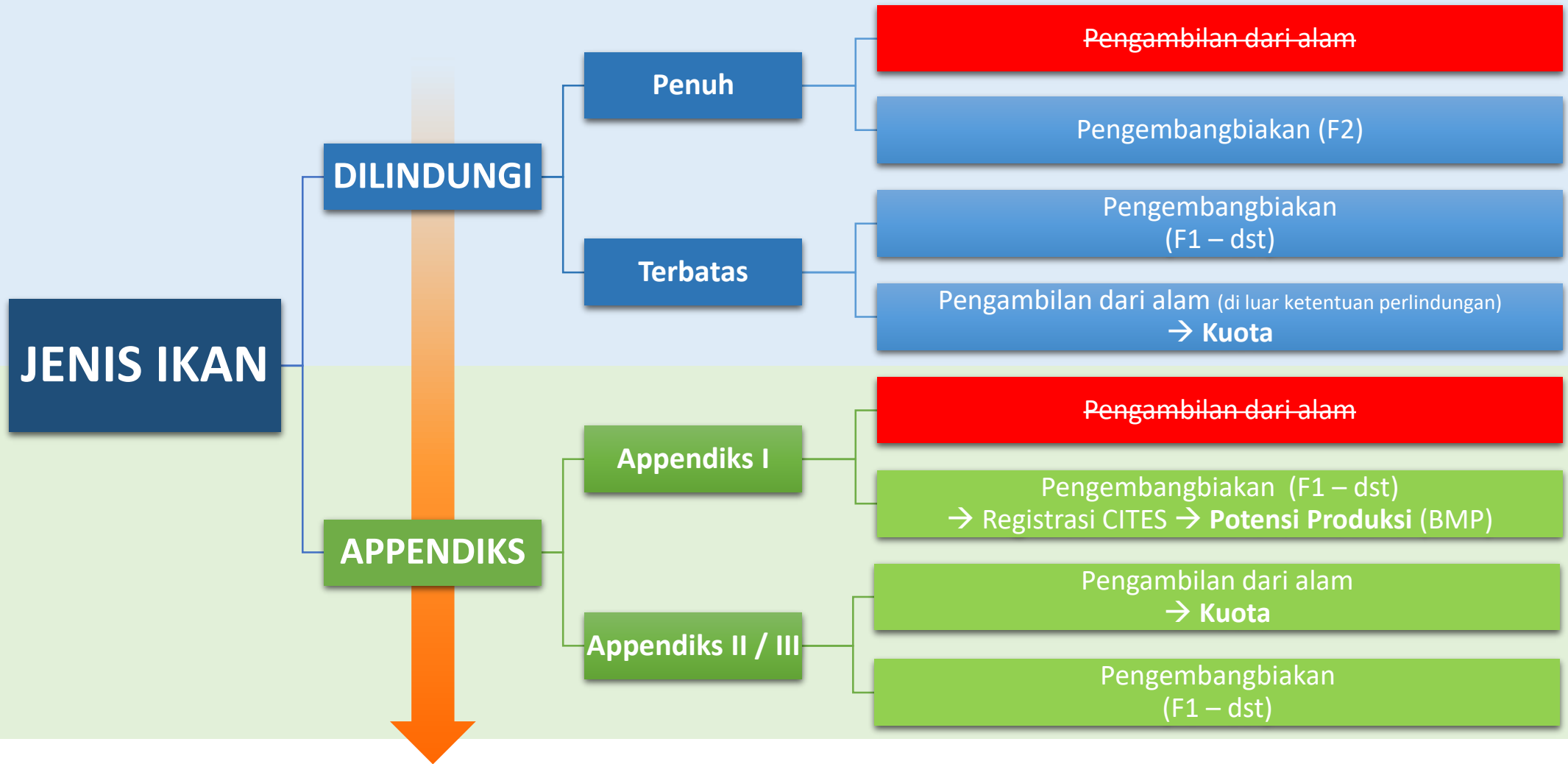
Contoh: SAJI

3. **Keberlanjutan (*Sustainability*)**

pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES wajib menerapkan prinsip-prinsip pemanfaatan lestari

Contoh: kontrol dengan mekanisme kuota

KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN/PERDAGANGAN BERDASARKAN STATUS PERLINDUNGAN



Pemanfaatan jenis ikan diberlakukan ketentuan pengaturan yang **lebih ketat**, apakah status perlindungannya atau Appendiks CITES
Contoh : Pari Manta (*Manta sp.*) dengan status **Dilindungi Penuh** dan **Appendiks II CITES**, maka dalam pemanfaatannya diberlakukan ketentuan jenis ikan yang dilindungi penuh

PEMANFAATAN JENIS IKAN berasal dari **PENGAMBILAN DARI ALAM**

SEGMENTASI USAHA



PEMANFAATAN JENIS IKAN berasal dari **PENGEMBANGBIAKAN**

SEGMENTASI USAHA



BENTUK PEMANFAATAN

Permen KP 61 / 2018

Pemanfaatan Jenis Ikan dilakukan melalui kegiatan:

1. penelitian dan pengembangan;
2. pengembangbiakan;
- 3. PERDAGANGAN;**
4. aquaria;
5. pertukaran; dan
6. pemeliharaan untuk kesenangan

Ruang Lingkup

Spesies Dilindungi /
Appendiks

Look alike species

Dokumen Perizinan

SIPJI

SAJI

SERTIFIKAT

REKOMENDASI

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

JENIS PUNGUTAN & FORMULASI PNBP

DRAFT

PUNGUTAN PNBP PEMANFAATAN JENIS IKAN

TARIF PNBP FIX

Surat Izin
Pemanfaatan
Jenis Ikan
(SIPJI)

Tarif PNBP
berdasarkan
jenis kegiatan
pemanfaatan
(per dokumen)

Surat Angkut
Jenis Ikan
(SAJI)

Tarif PNBP
berdasarkan
jenis jenis
aktivitas
pengangkutan
(DN/LN)
(per dokumen)

Rekomendasi

Tarif PNBP
berdasarkan
rekomendasi
yang dikeluarkan
(per dokumen)

TARIF PNBP FORMULASI

Pungutan
Pengambilan
Jenis Ikan
Dilindungi
sebagai **BMN**

Tarif PNBP x
**harga patokan
nilai konservasi**
**(per individu
per tahun)**

Pungutan
Pengambilan
Jenis Ikan
Dilindungi /
Appendiks CITES

Tarif PNBP x
**harga patokan
jenis ikan**
(per individu)

Pungutan
Perdagangan
Jenis Ikan
Dilindungi /
Appendiks CITES

Tarif PNBP x
**harga patokan
jenis ikan**
**(per satuan
volume produk)**

Denda

Tarif PNBP x
jumlah produk
yang tidak
sesuai dengan
permohonan
**(per individu /
satuan)**

LAMPIRAN JENIS PUNGUTAN & FORMULASI PNBP Pemanfaatan Jenis Ikan

1	Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang dilindungi dan/atau masuk dalam Appendiks CITES			
	a	Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Penelitian dan Pengembangan		
	1)	yang dilakukan oleh: orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau perguruan tinggi	per izin	Rp 1,920,000
	2)	yang dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia	per izin	Rp 3,080,000
	3)	yang dilakukan oleh lembaga penelitian Pemerintah	per izin	Rp 0
	b	Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Pengembangbiakan		
	1)	yang dilakukan oleh badan hukum Indonesia	per izin	Rp 8,520,000
	2)	yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau perguruan tinggi	per izin	Rp 4,120,000
	3)	untuk tujuan non-komersil	per izin	Rp 0
	c	Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Perdagangan		
	1)	dalam negeri	per izin	Rp 8,520,000
	2)	luar negeri	per izin	Rp 14,640,000

LAMPIRAN JENIS PUNGUTAN & FORMULASI PNBP Pemanfaatan Jenis Ikan

	d	Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Aquaria			
	1)	koleksi ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat buatan dan koleksi ikan mati oleh lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk tujuan non komersial	per izin	Rp	2,270,000
	2)	koleksi ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat buatan dan koleksi ikan mati oleh badan hukum Indonesia	per izin	Rp	8,520,000
	3)	peragaan dalam bentuk atraksi ikan hidup oleh badan hukum Indonesia	per izin	Rp	16,770,000
	e	Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Pertukaran			
	1)	pertukaran di dalam negeri oleh badan hukum Indonesia	per izin	Rp	3,020,000
	2)	pertukaran ke luar negeri oleh badan hukum Indonesia	per izin	Rp	18,020,000
	f	SIPJI Pemeliharaan untuk kesenangan jenis ikan dilindungi hasil pengembangbiakan oleh orang perseorangan	per izin	Rp	2,670,000

LAMPIRAN JENIS PUNGUTAN & FORMULASI PNBP Pemanfaatan Jenis Ikan

2	Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) yang dilindungi dan/atau masuk dalam Appendiks CITES			
a	Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)	per SAJI-DN	Rp	540,000
b	Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN)	per SAJI-LN	Rp	840,000
3	Rekomendasi pemanfaatan jenis yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan yang dilindungi, masuk dalam Appendiks CITES dan/atau dilarang ekspor			
	dalam negeri dan luar negeri	per rekomendasi	Rp	540,000
4	Pungutan penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi sebagai titipan negara, untuk kegiatan:			
a	indukan pengembangbiakan	per ekor per tahun		2.5% x estimasi nilai konservasi
b	aquaria	per ekor per tahun		5% x estimasi nilai konservasi
5	Pungutan penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi terbatas (diluar ketentuan perlindungannya), masuk dalam Appendiks II dan/atau III CITES dari habitat alam, untuk kegiatan:			
a	komersial (perdagangan)	per individu		6% x harga patokan
b	non komersial			-

6 Pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk dalam Appendiks CITES

a	jenis ikan dilindungi terbatas (diluar ketentuan perlindungannya), masuk dalam Appendiks II dan/atau III CITES dari hasil pengambilan di habitat alam	per ekor/ per Kg / per liter / per lembar / per piece	8% x harga patokan
b	jenis ikan dilindungi penuh turunan kedua (F2) dan/atau masuk dalam Appendiks I CITES turunan pertama (F1)	per ekor/ per Kg / per liter / per lembar / per piece	4% x harga patokan
c	jenis ikan dilindungi penuh turunan ketiga (F3) dan seterusnya dan atau Appendiks II CITES turunan kedua (F2) dan seterusnya	per ekor/ per Kg / per liter / per lembar / per piece	2% x harga patokan
d	jenis ikan yang masuk Appendiks II dan III CITES hasil pembesaran / perbanyakkan	per ekor/ per Kg / per liter / per lembar / per piece	5% x harga patokan
e	jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk dalam Appendiks CITES	per ekor/ per Kg / per liter / per lembar / per piece	1% x harga patokan



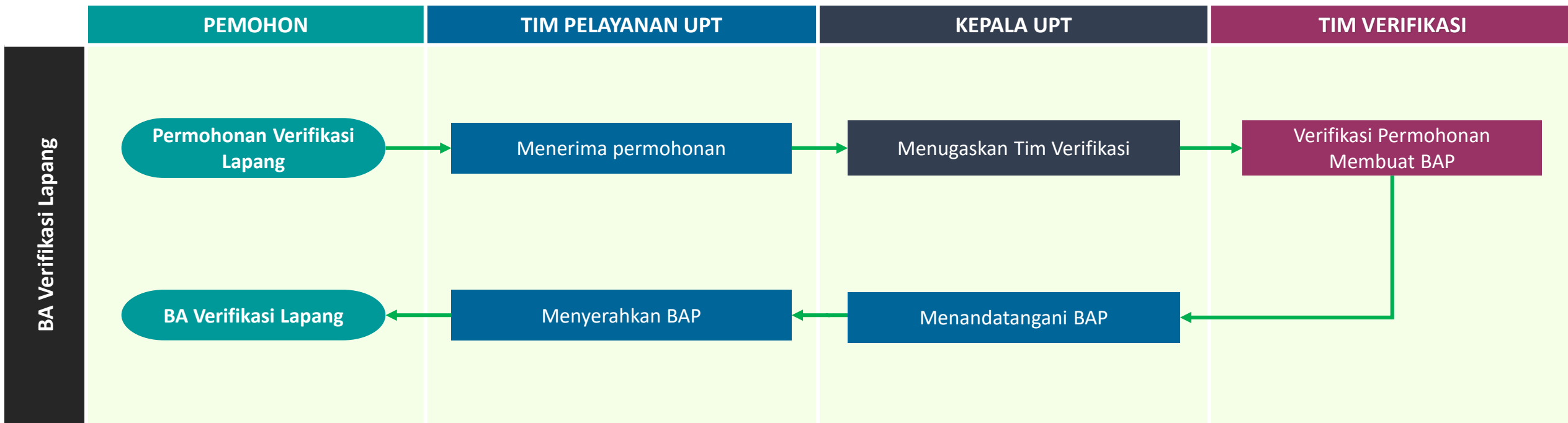
KEBIJAKAN TRANSISI

Selama masa transisi, Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Termasuk dalam Appendiks CITES mengacu pada ketentuan **SE MKP No.B-494/MEN-KP/IX/2020** a.l.:

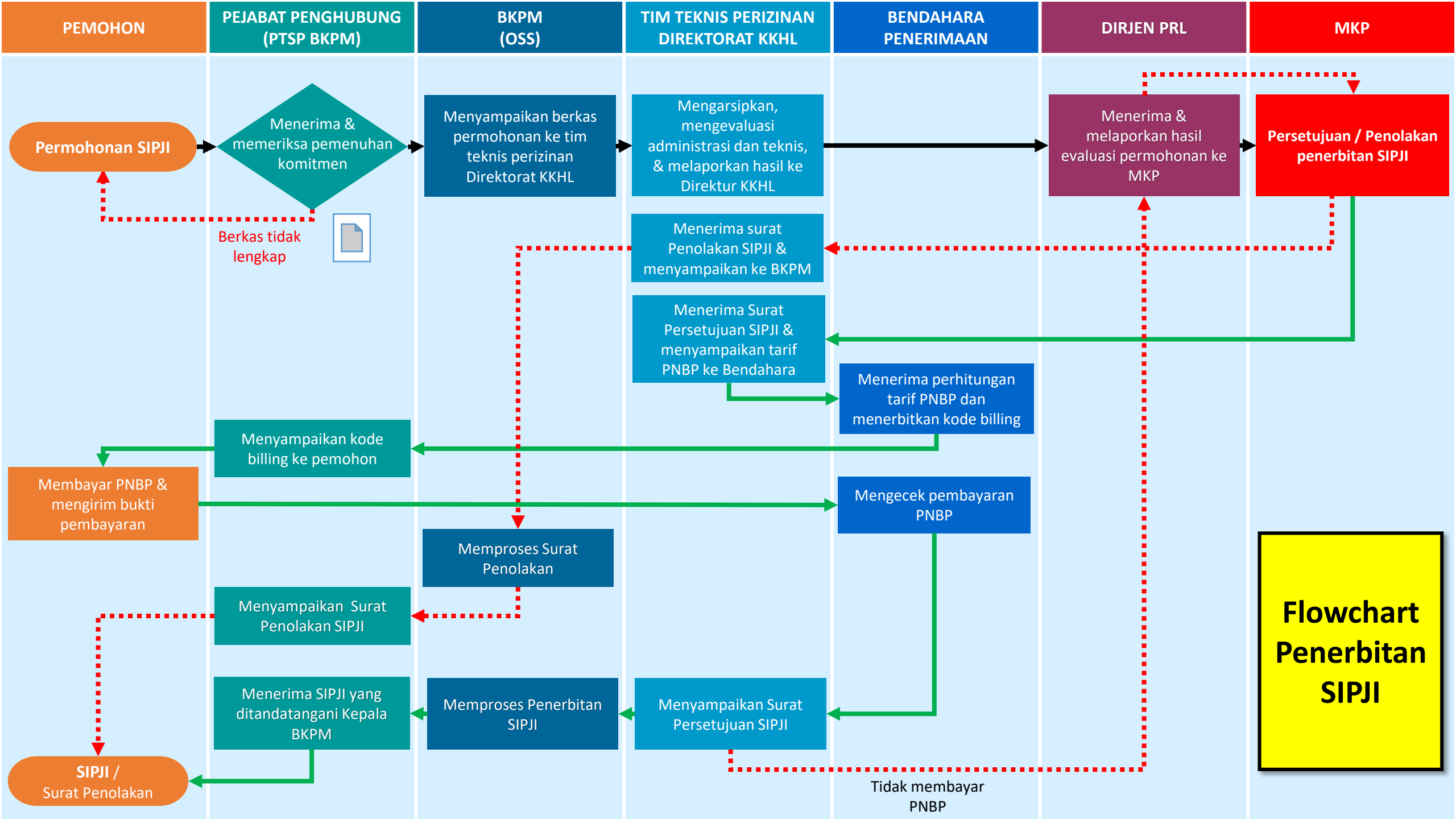
- Pelaku usaha masih dapat menggunakan izin yang diterbitkan KLHK **(dengan melakukan registrasi ke UPT atau Direktorat KKHL)** sekaligus mengurus dokumen perizinan yang ada di KKP;
- Selama masa transisi, Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Termasuk dalam Appendiks CITES **dapat dilalulintaskan** selama tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungannya dan dilengkapi dengan **surat rekomendasi** dari UPT Ditjen PRL;
- Pada **awal tahun 2021** pelaku usaha harus memiliki izin pemanfaatan dari KKP;
- Besaran pungutan PNBP untuk pengambilan dan perdagangan jenis ikan, menggunakan harga patokan yang ditetapkan oleh MKP (simulasi perhitungan pungutan PNBP).

Prosedur Penerbitan SIPJI

MEKANISME VERIFIKASI LAPANG PERMOHONAN SIPJI



- **VERIFIKASI LAPANG PERMOHONAN SIPJI** dilakukan sebelum pelaku usaha memohonkan Penerbitan SIPJI kepada BKPM / PTSP KKP.
- Pelaku usaha membuat Proposal Permohonan Penerbitan SIPJI sebelum memohonkan verifikasi lapang
- Verifikasi lapang dilakukan dengan memeriksa kesesuaian informasi pada proposal, dengan output yang dituangkan dalam BAP
- BAP dilampirkan pelaku usaha saat mengajukan permohonan penerbitan SIPJI



**Flowchart
Penerbitan
SIPJI**

TEMPAT PELAYANAN PERIZINAN

BKPM



Jl. Gatot Subroto No.44 Senayan, Jakarta Selatan



08071002576 atau 1500765 (Contact Center)



info@bkpm.go.id

PTSP KKP



Gd. Mina Bahari IV Lantai 1

Jl. Medan Merdeka Timur 16 Jakarta



0812 9229 0511



Pelayanan_djprl@kkp.go.id

PUSAT PELAYANAN PEMANFAATAN JENIS IKAN DILINDUNGI/APPENDIKS CITES
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT (PRL)
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP)

No	UPT	ALAMAT	TELP	Wilayah Kerja	Kantor Wilayah Kerja
1.	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL)	Jl. Medan Merdeka Timur, Gedung Minabahari 3 Lt. 10 Jakarta Pusat	021-3519070		
2.	Balai PSPL Padang	Jl. Raya Pertanian, Sei Duo - Sungai Lareh, Kelurahan Lubuk Minturun, Kec. Koto Tangah, Lubuk Minturun, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586	0751-497052	7 Provinsi DI Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, <u>Sumatera Barat</u> , Jambi	Medan, Pekanbaru dan Tanjung Pinang
3.	Balai PSPL Denpasar	Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Km 16.7, Desa Pering, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali	0361-4794821	4 Provinsi <u>Bali</u> , Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur	Surabaya (Jatim), Mataram (NTB), Kupang (NTT)
4.	Balai PSPL Makassar	Jalan Makmur Dg. Sitakka No. 129, Turikale, Raya, Kec. Turikale, Kab. Maros, Sulawesi Selatan 90512	0411-371337	5 Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara	Palu (Sulteng), Manado (Sulut), Kendari (Sultra)
5.	Balai PSPL Pontianak	Jl. Husein Hamzah No.1, Pal Lima, Kec. Pontianak Barat., Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78114	0561-766691	5 Provinsi <u>Kalimantan Barat</u> , Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara,	Balikpapan (Kaltim), Banjarmasin (Kalsel)
6.	Loka PSPL Serang	Jl. Raya Carita Km 4,5 Caringin Labuan, Caringin, Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten 42264	0253-802626	8 Provinsi Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, <u>Banten</u> , DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta	DKI Jakarta, Bandar Lampung (Lampung), Semarang (Jateng)
7.	Loka PSPL Sorong	Distrik, Jl. KPR PDAM No.Km 10, Klawuyuk, Sorong Tim., Kota Sorong, Papua Barat. 98416	0951-323089	4 Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara	Merauke (Papua), Ambon (Maluku)



DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



TERIMA KASIH

KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN SIPJI

1

Surat Permohonan



2

Dokumen Kelengkapan Permohonan

Proposal



NIB

SIUP (khusus untuk SIPJI Perdagangan)

Surat Pernyataan
(asal-usul, kesanggupan membayar PNPB,
kesanggupan memperoleh izin pengambilan)



3

Berita Acara Verifikasi Lapang



Permohonan Pendaftaran SIPJI Kegiatan Perdagangan

Nomor Surat:.....

Kepada :

Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta Pusat 10110

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Pemohon :
Status Perusahaan : (Badan hukum / Perseorangan)
NIB :
SIUP :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

Bersama ini kami mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) **Hiu dan Pari Appendiks II CITES** untuk kegiatan Perdagangan Dalam Negeri / Luar Negeri*.

Untuk keperluan tersebut diatas kami lampirkan :

- a. Fotokopi NIB
- b. Fotokopi SIUP yang masih berlaku
- c. Proposal

Demikian Surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

....., tanggal/bulan/tahun

Hormat kami,
Penanggung jawab

ttd & cap stempel

(Nama Pemohon)

*) : pilih salah satu



PROPOSAL
PERMOHONAN SURAT IZIN PEMANFAATAN JENIS IKAN (SIPJI)
PERDAGANGAN



[NAMA PERUSAHAAN]
 Alamat dan Nomor Telepon

FORMULIR
PERMOHONAN SURAT IZIN PEMANFAATAN JENIS IKAN (SIPJI)
PERDAGANGAN

A KELENGKAPAN ADMINISTRASI		
1	Data Pemohon	
	a. Nama Pemohon	
	b. Penanggung jawab	
	c. Alamat Kantor	
	d. Alamat Gudang	
	e. Jenis Izin yang dimohonkan	SIPJI Perdagangan Dalam Negeri / Luar Negeri *
	f. Jenis Ikan yang dimohonkan	
	Nama Lokal	Nama Umum
	Nama Latin	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)	
	a. Nomor	
	b. Instansi Penerbit	
	c. Nama dan Kode KBLI	
	d. Jenis API	
	e. Status Penanaman Modal	
	f. Tanggal penerbitan NIB	
3	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	
	a. Nomor	
	b. Instansi penerbit	
	c. Nama dan Kode KBLI	
	d. Barang / Jasa Dagangan Utama	
	e. Tanggal penerbitan SIUP	
	f. Masa berlaku	
B GAMBARAN USAHA		
4	Asal-Usul Jenis Ikan	
	a. Pengambilan dari Alam*	
	Lokasi Pengambilan	Perkiraan Waktu Pengambilan/Penangkapan
	Jumlah Armada	

	b. Hasil Pengembangbiakan*		
	Nama Penjual	No. SIPJI Pengembangbiakan	Daerah Pengembangbiakan
	c. Pembelian*		
	Nama Penjual	No. SIPJI Perdagangan DN	Daerah Pembelian
5	Tujuan perdagangan		
	a. Tujuan	Dalam Negeri / Luar Negeri *	
	b. Negara / Kota		
6	Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Perusahaan		
	a. Gudang		
	Volume Gudang	Kapasitas Gudang	Status Kepemilikan
	b. Unit Pengolahan Ikan (UPI)		
	Kapasitas Produksi	Proses yang dilakukan	Hasil Produk
	c. Lainnya		
	Jenis	Jumlah	Status kepemilikan
7	Sistem Pengelolaan Air <i>(khusus perdagangan ikan hidup)</i>		
	a. Treatment Pengelolaan Air		
	b. Sertifikasi Pengelolaan Air yang dimiliki perusahaan		
8	Perhitungan Estimasi Produksi Selama 1 Tahun		
	Jenis Ikan	Jumlah (ekor)	Jumlah (kg)
9	Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja		
	Jabatan	Jumlah (orang)	Pendidikan

10	Informasi tambahan
	❖ dokumentasi kegiatan perdagangan dan data-data pendukung kegiatan usaha agar dilampirkan

(*) coret yang tidak diperlukan

Pemohon,

Nama
Jabatan

Ketentuan pengisian proposal:

1. Font Arial 11
2. Menggunakan kertas HVS A4 80 gram
3. Menggunakan softcover putih dan dijilid spiral
4. Proposal dicetak rangkap 4 (empat)
5. File proposal disimpan dalam bentuk .pdf

KOP PERUSAHAAN
Surat Keterangan Asal-Usul Jenis Ikan
Nomor Surat:.....

Yang bertandatangan di bawah ini;
Pemohon :
NIB :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

Bersama ini kami menyatakan sanggup dan bersedia untuk membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) sesuai dengan tarif yang berlaku untuk kegiatan :
Pengembangbiakan / Perdagangan Dalam Negeri / Perdagangan Luar Negeri / Aquaria / Pertukaran / Pemeliharaan untuk Kesenangan *).

Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan saya bertanggung jawab atas kebenaran isi surat pernyataan ini serta **bersedia dituntut menurut ketentuan hukum yang berlaku**, apabila saya mengingkari surat pernyataan ini.

.....
Yang menyatakan,
Penanggung jawab

Materai

 coret yang tidak perlu

KOP PERUSAHAAN

Kesanggupan Memperoleh Izin Pengambilan
Nomor Surat:.....


Yang bertandatangan di bawah ini;
Pemohon :
NIB :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

Bersama ini kami menyatakan sanggup dan bersedia untuk kesanggupan untuk memperoleh Izin Pengambilan dari alam setelah sarana dan prasarana penampungan selesai dibangun sebagai syarat pemanfaatan jenis ikan yang berlaku untuk kegiatan :
Pengembangbiakan / Perdagangan Dalam Negeri / Perdagangan Luar Negeri / Aquaria / Pertukaran / Pemeliharaan untuk Kesenangan *).

Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan saya bertanggung jawab atas kebenaran isi surat pernyataan ini.

.....
Yang menyatakan,
Penanggung jawab

Materai

 coret yang tidak perlu

KOP PERUSAHAAN
Kesanggupan membayar PNBP
Nomor Surat:.....


Yang bertandatangan di bawah ini;
Pemohon :
NIB :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

Bersama ini kami menyatakan sanggup dan bersedia untuk membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) sesuai dengan tarif yang berlaku untuk kegiatan :
Pengembangbiakan / Perdagangan Dalam Negeri / Perdagangan Luar Negeri / Aquaria / Pertukaran / Pemeliharaan untuk Kesenangan *).

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Yang menyatakan,
Penanggung jawab

Materai

 pilih salah satu

KOP SURAT

BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANG

Nomor :

Dasar : a. Surat Permohonan Verifikasi Lapang No. ...
b. Surat Perintah Verifikasi Lapangan No. ...

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20....
bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1	Nama	_____
	NIP	_____
	Jabatan	_____
2	Nama	_____
	NIP	_____
	Jabatan	_____

menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan lapang terhadap:

Nama Perusahaan	_____
Alamat	_____

Berdasarkan hasil verifikasi lapang yang dilakukan menunjukkan bahwa unit usaha yang diperiksa **memenuhi / tidak memenuhi** syarat untuk kategori perizinan yang dimohonkan.

Demikian Berita Acara Verifikasi Lapang ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____	Pemeriksa	_____
Perwakilan Perusahaan	_____	Mengetahui, Kepala Balai/Loka _____

Checklist Proposal SIPJI Perdagangan

No.	Substansi	Sesuai	Tidak sesuai	Keterangan
A	KELENGKAPAN ADMINISTRASI			
1	Data Pemohon			
	a. Nama Pemohon			
	b. Penanggung jawab			
	c. Alamat Kantor			
	d. Alamat Gudang			
	e. Jenis Izin yang dimohonkan			
	f. Jenis Ikan yang dimohonkan			
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)			
3	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)			
B	GAMBARAN USAHA			
4	Asal-Usul Jenis Ikan			
5	Tujuan Perdagangan			
6	Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Perusahaan			
7	Sistem Pengelolaan Air (khusus perdagangan ikan hidup)			
8	Perhitungan Estimasi Produksi Selama 1 Tahun			
9	Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja			

Checklist Proposal SIPJI Pengembangbiakan

No.	Substansi	Sesuai	Tidak sesuai	Keterangan
A	KELENGKAPAN ADMINISTRASI			
1	Data Pemohon			
	a. Nama Pemohon			
	b. Penanggung jawab			
	c. Alamat Kantor			
	d. Alamat Gudang			
	e. Jenis Izin yang dimohonkan			
	f. Jenis Ikan yang dimohonkan			
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)			
B	GAMBARAN USAHA			
3	Tujuan Pengembangbiakan			
4	Asal-Usul Jenis Ikan			
5	Lokasi Pengembangbiakan			
6	Jumlah Indukan/Benih yang Dimiliki Perusahaan			
7	Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Perusahaan			
8	Metode Pengembangbiakan dan Teknologi yang Digunakan			
9	Perhitungan Estimasi Produksi Pengembangbiakan Selama 1 Tahun			
10	Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja			



DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



TERIMA KASIH